

Peran Polisi



dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia

Penulis:
Eko Prasetyo
Busyro Muqqodas
Suparman Marzuki
Eko Riyadi
Laode Arham
Imran

Kata Pengantar:
Adrianus Meliala, Ph.D.

Peran Polisi

dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia

Peran Polisi

dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia

Penulis:

Eko Prasetyo, SH.

Busyro Muqqodas, SH, M.Hum.

Suparman Marzuki, SH, M.Si.

Eko Riyadi, SH.

Laode Arham, SS.

Imran, SH.

Kata Pengantar:

Adrianus Meliala, Ph.D.

PUSHAM UII
The Asia Foundation

Katalog Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT)

**Peran Polisi dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia—Eko
Prasetyo, Busyro Muqqodas, Suparman Marzuki, Eko
Riyadi, Laode Arham, dan Imran, Yogyakarta:
PUSHAM UII, Oktober 2004**

**192 halaman, i-xii, 14,5 x 21 cm
ISBN 979-3723-14-9**

Cetakan Pertama, Oktober 2004

**Penyunting: Ririn Tri Astuti
Desain Sampul: Resist Book Design
Kompugrafi: Lantip**

**Diterbitkan oleh:
PUSHAM UII
Jl. Kusumanegara No. 218
Yogyakarta
Telp./Faks. 0274-375006
E-mail pushamuii@yahoo.com
Website www.pushamuii.org**

**Dicetak oleh:
Nailil Printika
Telp. 0274-7422761
E-mail nailil@gmail.com**

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi

1. Polisi Berorientasi Masyarakat
Sebuah Pengantar
oleh Eko Prasetyo ♦ v
2. Daftar Isi ♦ xi
3. Kata Pengantar:
Community Policing:
Berpijak dari Inisiatif Masyarakat
oleh Adrianus Meliala, Ph.D. ♦ 1
4. Pemolisian Berbasis Masyarakat
Suatu Fokus pada Efektivitas
Suatu Pendekatan Teoritis
oleh Letkol. Purn. Soekamid ♦ 7
5. Peran Polisi di Tengah Kompleksitas Sosial
Masyarakat Bali
oleh Laode Arham, SS ♦ 25
6. Kekerasan Struktural dan Problem Etnisitas di
Kalimantan Barat
*oleh Suparman Marzuki, SH, M.Si
dan Eko Riyadi, SH* ♦ 61
7. Meretas Jalan Damai di Bumi Ambon Manise:
Sebuah Tantangan bagi Polisi dan Masyarakat
*oleh Busyro Muqodas, SH, M.Hum
dan Imran, SH* ♦ 99
8. Menimbang Peran Polisi di Aceh,
Antara Masyarakat dan Konflik
oleh Laode Arham, SS dan Imran, SH ♦ 129
9. Menyegarkan Kembali Hubungan Polisi &
Masyarakat
Refleksi Pengalaman Program COP di DIY
oleh Eko Prasetyo ♦ 157
10. Daftar Pustaka ♦ 185

- 10. Tentang Penulis ♦ 189
- 11. Mengenal PUSHAM UII ♦ 191



Kekerasan Struktural dan Problem Etnisitas di Kalimantan Barat

oleh Suparman Marzuki, SH, M.Si
dan Eko Riyadi, SH

Konflik etnis yang terjadi di Pontianak, atau lebih luasnya Kalimantan Barat, adalah sebuah bencana besar pasca Orde Baru. Konflik Melayu-Madura-Dayak, menambah catatan buram tentang penderitaan masyarakat sipil di masa transisi. Peristiwa ini ditandai dengan serangkaian tindak kekerasan, praktek kriminal, dan berujung pada kekerasan yang massif. Kekerasan tidak saja berlangsung secara 'sinkronik', melainkan juga mempunyai akar-akar 'diakronik'. Terdapat tarikan historis dari masa pra-penjajahan, hingga masa Orde Baru. Dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana konflik yang terjadi adalah sebuah perpaduan antara kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang kompleks.

Dalam konteks ini, Pusham UII memilih kota Pontianak sebagai lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat pasca konflik. Penelitian ini berada dalam 'bingkai' program *Community Oriented Policing* (COP) yang sedang dikembangkan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan Polri. Studi lapangan ini

dilakukan pada Desember 2003, oleh Suparman Marzuki. Responden yang diambil sejumlah 65 orang warga Pontianak, dan mewakili berbagai etnis yang ada.

COP adalah sebuah program untuk mendekatkan Polisi dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dan sosial. Polisi dan masyarakat adalah obyek penelitian dalam studi kasus ini. Riset dan tulisan ini berada dalam garis tujuan sebagai berikut:

Pertama, ingin melihat bagaimana genealogi kekerasan dan konflik di Pontianak (Kalimantan Barat)? Bagaimanakah relasi sosial antar etnis dan masyarakat di sana? *Kedua*, menjelaskan konteks ekonomi, kultural, sosial masyarakat yang melahirkan berbagai tindak kriminalitas? *Ketiga*, bagaimanakah peran aparat keamanan (Polisi) dalam menangani problem-problem etnis dan masalah keamanan tersebut. Sekaligus apa yang menjadi problem internal aparat juga akan disorot dalam tulisan ini.

Kota Pontianak dipilih sebagai daerah penelitian, didasarkan pada fakta sosial bahwa daerah tersebut pernah mengalami konflik sosial yang luar biasa. Kerusuhan terjadi antara komunitas 'pribumi', yaitu masyarakat Dayak-Melayu, dengan komunitas pendatang dari Pulau Madura. Pada saat yang sama aparat Kepolisian didera keterlambatan dalam menangani konflik tersebut.

Pontianak dan Problem Etnisitas

Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat merupakan kota dengan etnis yang sangat beragam.¹ Kalimantan Barat sendiri memiliki luas wilayah 146.760 km², yang berarti hampir mencapai seperlima dari luas pulau Kalimantan seluruhnya, atau lebih luas dari pulau Jawa bersama pulau Madura. Enam puluh lima persen wilayah provinsi Kalimantan Barat terdiri dari hutan. Itu artinya, Kalimantan sangat kaya akan berbagai jenis

kayu.² Sumber daya alam ini tentunya menjadi 'madu' yang menggiurkan bagi siapa saja, termasuk penguasa dan para pemodal.

Selama ratusan tahun, etnis Dayak, Melayu dan Cina telah mendiami kawasan ini. Namun keragaman etnis dan kekayaan alam kadang menjadi penyebab rentannya interaksi sosial diantara mereka. Seperti konflik terakhir yang terjadi antara Melayu-Madura-Dayak telah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Trauma sosial harus dihadapi masyarakat dari pihak-pihak yang bertikai. Struktur sosial yang selama ini telah mapan kembali terkoyak oleh konflik. Tidak terhitung lagi nyawa manusia yang tidak berdosa melayang, anak-anak kehilangan orang tuanya, serta semua aset yang selama ini telah dibangun menjadi hancur kembali.

Dayak.

Dayak adalah suku yang dianggap pertama kali mendiami wilayah Kalimantan. Diperkirakan suku ini mulai datang ke pulau Kalimantan pada tahun 3000-1500 SM. Mereka adalah kelompok-kelompok yang bermigrasi dari daerah Yunan, Cina Selatan. Kelompok ini disebut Proto-Melayu. Dari daratan Asia kelompok-kelompok kecil tersebut mengembara melalui Indocina ke Semenanjung Malaya. Berlanjut ke berbagai pulau di Indonesia, termasuk Kalimantan. Beberapa kelompok lain diperkirakan bergerak melalui Hainan, Taiwan dan Filipina. Beberapa kelompok, terutama yang kemudian menetap di bagian selatan Kalimantan, kemungkinan besar untuk beberapa waktu singgah di Sumatera dan Jawa.³

Perpindahan ini terjadi pada zaman glasial (zaman es), dimana permukaan laut sangat surut, sehingga dengan perahu-perahu kecil, mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Teknologi perundagian yang telah dikenal di daratan Asia sekitar

tahun 1500 SM memungkinkan perpindahan mereka menggunakan perahu bercadik. Masa bercocok tanam diperkirakan dimulai sekitar tahun 1000 SM. Beliung persegi dan kapak persegi yang dibuat dengan teknologi perundagian ditemukan di Nanga Balang, Kapuas Hulu. Kehidupan religius pada zaman ini adalah memuja roh nenek moyang, sesuai dengan kehidupan masyarakat zaman Megalithikum. Peninggalan zaman ini adalah dolmen yang ditemukan di Sedahan Sukadana, Ketapang.⁴

Mula-mula suku Dayak mendiami tepi sungai Kapuas dan pantai-pantai Kalimantan. Tetapi kedatangan bangsa Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya memaksa suku Dayak berpindah ke hulu-hulu sungai.

Melayu.

Etnis melayu datang ke Kalimantan dari Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Pada awalnya mereka dianggap datang dengan tujuan menjajah dan merampas hasil hutan yang ada di Kalimantan. Dalam perkembangannya, etnis Melayu ini kemudian menjadi besar dan akhirnya mendirikan kerajaan yaitu kerajaan Sambas.⁵

Kedatangan orang Melayu membawa dampak terpinggirkannya suku Dayak, yang sebelumnya mendiami wilayah tersebut. Secara pendidikan dan kemampuan mengolah alam, etnis Melayu memiliki kemampuan lebih dibandingkan etnis Dayak. Hutan-hutan yang selama ini dihuni etnis Dayak sedikit demi sedikit mulai dieksploitasi. Eksploitasi ini dilakukan oleh masyarakat pendatang dan pemerintah, waktu itu dengan menerbitkan HPH kepada beberapa orang yang dekat dengan penguasa.

Cina.

Sejak abad ke-3, pelaut Cina telah berlayar ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Rute pelayaran

menyusuri pantai Asia Timur dan pulangny melalui Kalimantan Barat dan Filipina dengan mempergunakan angin musim.⁶ Pada abad ke-7, hubungan Tiongkok dengan Kalimantan Barat sudah sering terjadi, tetapi belum menetap. Imigran dari Cina kemudian masuk ke Kerajaan Sambas dan Mempawah. Mereka kemudian bergabung dalam kongsi sosial politik yang berpusat di Monterado dan Bodok dalam Kerajaan Sambas, dan Mandor dalam Kerajaan Mempawah.⁷

Tahun 1292, pasukan Khubilai Khan di bawah pimpinan Ike Meso, Shih Pi dan Khau Sing dalam perjalanannya untuk menghukum Kertanegara, singgah di kepulauan Karimata. Karena kekalahan pasukan ini dari angkatan perang Jawa dan takut mendapat hukuman dari Khubilai Khan, kemungkinan besar beberapa dari mereka melarikan diri dan menetap di Kalimantan Barat.⁸

Pada tahun 1407, di Sambas didirikan Muslim/*Hanafi-Chinese Community*. Tahun 1463 laksamana Cheng Ho, seorang Hui dari Yunan, atas perintah Kaisar Cheng Tsu alias Jung Lo (kaisar keempat dinasti Ming) memimpin ekspedisi pelayaran ke Nan Yang selama tujuh kali. Beberapa anak buahnya ada yang kemudian menetap di Kalimantan Barat dan membaaur dengan penduduk setempat. Mereka juga membawa ajaran Islam yang mereka anut.⁹

Di abad ke-17 bangsa Cina hijrah ke Kalimantan Barat menempuh dua rute, yakni melalui Indocina-Malaya-Kalimantan Barat dan Borneo Utara-Kalimantan Barat. Tahun 1745, orang Cina didatangkan besar-besaran untuk kepentingan perkongsian, karena Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah menggunakan tenaga orang Cina sebagai wajib rodi. Mereka dipekerjakan di tambang-tambang emas. Kedatangan mereka di Monterado membentuk kongsi Taikong (Parit Besar) dan Samto Kiaw (Tiga Jembatan).¹⁰

Madura.

Etnis lain yang cukup berpengaruh secara ekonomi, sosial dan kultural di kawasan Kalimantan Barat adalah Madura. Etnis Madura mulai melakukan migrasi ke Kalimantan Barat pada tahun 1902. Mereka datang melalui jalur perdagangan garam, sapi dan kambing. Mengetahui kesuburan tanah Kalimantan, generasi pertama pendatang kemudian menjemput sanak keluarga dan teman-teman mereka di Madura. Mereka berlayar menggunakan perahu-perahu kecil dan mengikuti angin timur bertiup, yakni antara bulan Maret dan Oktober. Pada awalnya mereka bekerja sebagai pekerja kasar seperti; menebang kayu di hutan, membuka lahan pertanian dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Pontianak, Sambas dan Ketapang adalah sasaran migrasi dari Madura.¹¹

Arus migrasi dari Madura semakin deras pada zaman Orde Baru, setelah dibukanya jalur angkutan laut Surabaya-Kalimantan Barat. Mereka yang bermigrasi ke Kalimantan Barat rata-rata adalah orang Madura yang berpendidikan rendah dan buta huruf. Di sana mereka bersedia bekerja apa saja, seperti menjadi buruh bangunan, buruh jalan, tukang sampah dan tukang becak. Pada tahun 1930 misalnya, ketika di Kalimantan Barat mulai dibangun prasarana jalan, semakin banyak orang Madura berdatangan untuk menjadi buruh kasar. Migrasi orang Madura juga semakin lancar melalui jalur transmigrasi swakarsa. Para transmigran swakarsa tersebut pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani.¹²

Bugis

Etnis Bugis berasal dari pulau Sulawesi Selatan, etnis terkecil yang ada di wilayah Kalimantan. Kedatangan etnis Bugis secara historis ke Kalimantan Barat bermula dari datangnya Daeng Mataku yang menikah dengan Ratu Malaya, yaitu salah seorang anak Pangeran Agung dari kerajaan Sukadana. Daeng Mataku ini pada tahun 1710

pernah membantu menyerang Istana Sultan Zainuddin atas suruhan Pangeran Agung, saudara kandung Zainuddin. Karena jasanya, Daeng Matakü diangkat menjadi Panglima dan akhirnya keturunan Daen Matakü ini tersebar di daerah Sukadana dan sekitarnya.¹³

Dalam perkembangannya, orang Bugis tersebar ke seluruh wilayah Kalimantan Barat dan membaür dengan etnis lain terutama Melayu. Di Ketapang, mereka menetap di Sungai Putri, Satong, Siduk Semanai, Melinum, Sukadana, Rantao Panjang dan Teluk Batang. Di Pontianak mereka ada di Segedong, Teluk Pakedai, Batu Ampar, Sungai Kakap. Di kota Pontianak, ada dua kampung Bugis besar yang berada di wilayah tersebut yaitu Bugis Dalam dan Bugis Luar. Keduanya terletak di kawasan Tanjung Hilir yang bersebelahan dengan kampung Rab dan Keraton Kadariyah. Kampung Bugis di kota Pontianak ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Pontianak.

Dalam kesehariannya, orang Bugis dikenal sebagai pekerja keras dan ulet. Mereka masih memegang teguh adat dan tradisi Bugis. Dalam interaksi sosialnya, orang Bugis tidak eksklusif, mereka menetap di kampung-kampung yang juga dihuni oleh etnis lain seperti Melayu, Cina, Madura, Sunda, Jawa dan Dayak.¹⁴

Relasi dan Ketegangan

Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para sosiolog dan antropolog. Beberapa kesimpulan tentang pola interaksi antara kelima etnis yang menghuni Kalimantan Barat tersebut cukup beragam. Salah satu ciri pokok dari hubungan ini adalah hubungan yang didasarkan atas persamaan agama, kepentingan ekonomi dan afiliasi politik yang sama.

Prof Hendro misalnya menilai bahwa hubungan Madura dengan Bugis diwarnai sikap kerjasama,

sedangkan dengan Melayu terjalin sangat erat karena persamaan agama. Berbeda dengan Madura-Dayak yang banyak diwarnai sikap prasangka dan persaingan. Sedangkan dengan Tionghoa lebih merupakan hubungan ekonomi karena hubungan jual beli. Sementara hubungan Tionghoa-Dayak secara umum sangat baik karena didasari kesamaan nasib bahwa kedua etnis ini kebanyakan adalah sesama petani, meski dalam banyak hal hubungan kedua etnis ini lebih didasari motif ekonomi: *tauke* (majikan)-*abak buah* (pekerja).¹⁵

Seorang sosiolog Universitas Tanjungpura pernah mengadakan penelitian yang hasilnya menyebutkan bahwa hubungan antara Tionghoa dengan etnis lain coraknya sangat beragam. Hubungan Tionghoa dengan Melayu awalnya sangat baik namun setelah konflik pertambangan emas, dimana Tionghoa memberontak maka hubungannya menjadi buruk. Begitu juga dengan Dayak, awalnya hubungan antara Dayak-Tionghoa sangat erat hingga orang Dayak menyebut Tionghoa sebagai 'sobat'. Namun sejak 1967 hubungan mereka menjadi rusak ketika Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia.¹⁶

Pada tahun 1960 ketika muncul negara Malaysia, Soekarno menganggap Malaysia sebagai negara boneka Inggris. Sehingga, sejak 1963 daerah Kalimantan Barat mulai dijadikan basis militer Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berakhir pada 1966, pemerintah Orde Baru mencoba menghapus semua kantong pro-Soekarno yang pada tahun-tahun sebelumnya telah dibentuk untuk melawan Nekolim Inggris dengan menuduh kekuatan pro-Soekarno sebagai kekuatan PGRS/Paraku yang berideologi komunis dan didukung warga Tionghoa dan RRC.¹⁷

Pada Oktober 1967, terjadi konflik besar antara Dayak versus Tionghoa, pemerintah orde baru melalui militer yang dipimpin Kodam Tanjung Pura melakukan

mobilisasi etnik Dayak untuk 'menghabisi' etnik Tionghoa terutama yang tinggal di daerah perbatasan. Ironinya Tionghoa yang dipaksa keluar dari daerah perbatasan adalah mereka yang dituduh PGRS/Paraku, yang pada masa sebelumnya dilatih oleh militer untuk berkonfrontasi dengan Malaysia. Orang Dayak dimobilisasi untuk mengusir warga Tionghoa, maka periode ini dinamakan periode 'demonstrasi' yang berlangsung selama tiga bulan. Ribuan warga Tionghoa mati terbunuh pada peristiwa ini.¹⁸

Dari uraian di atas, tampak bahwa ketegangan antaretnis kerap kali dipicu oleh masalah-masalah politik, kekuasaan, dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Tetapi ketegangan antaretnis, terutama pasca '65 dan masa Orde Baru, dapat digambarkan sebagai ketegangan yang diciptakan oleh kepentingan kekuasaan nasional. Pertikaian berskala massif timbul ketika digerakkan oleh kekuatan yang maha besar, dalam hal ini pemerintah dan militer. Meskipun demikian, perbedaan tipikal dan karakter tiap-tiap etnis juga menjadi faktor mudahnya konflik terjadi.

Salah satu peristiwa penting di masa transisi demokrasi adalah konflik berdarah tiga serangkai antara Melayu-Madura-Dayak. Peristiwa ini sangat menghebohkan, tidak sedikit nyawa yang melayang. Orang dibantai dengan cara-cara yang sadis seperti penggal kepala, pemerkosaan dan pembunuhan dengan cara mengeluarkan organ dalam manusia seperti jantung dan hati dari orang yang dibunuh.

Kekerasan dari Masa ke Masa

Pra dan masa Penjajahan.

Secara historis, konflik di daerah Kalimantan Barat telah berlangsung sejak 1745. Pada tahun tersebut Sultan

kerajaan Melayu Sambas dan Mempawah mendatangkan warga Tionghoa dari daratan Cina untuk mengeksploitasi emas di daerah Kalimantan Barat. Sentra-sentra emas pada waktu itu diantaranya adalah Monterado, Budok (Kabupaten Sambas) dan Mandor (Kabupaten Pontianak).¹⁹

Populasi Tionghoa ini kemudian berkembang menjadi kian besar. Pada tahun 1770 mereka membuat kongsi-kongsi sendiri dan akhirnya tidak mau tunduk dan tidak mau membayar upeti pada kerajaan Sambas dan kerajaan Mempawah. Akhirnya peperanganpun terjadi. Pada tahun 1850 peristiwa serupa terjadi ketika pemberontakan oleh kongsi Thai Kong, Sam Tiu Kiu, Mang Kit Tiu, akhirnya peperangan dimenangkan oleh kerajaan Sambas dan Mempawah setelah mereka meminta bantuan kepada Belanda.²⁰

Pertikaian selanjutnya adalah pertikaian antara Tionghoa dan Dayak. Hal ini terjadi hasil permainan politik kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas menempatkan orang-orang Dayak sebagai pengaman kongsi. Ketika terjadi pemberontakan antar kongsi maka otomatis orang Dayak banyak yang terbunuh. Pembunuhan terhadap warga Dayak itulah yang menyebabkan peperangan antara Dayak-Tionghoa, selain orang Dayak memang tidak mau tunduk pada kongsi. Peperangan ini terjadi pada tahun 1830 dan dikenal dengan istilah Perang Sungkung, yaitu perang antarsuku yang terjadi di daerah Kongsi Mandor, Kongsi Monterado dan Kongsi Budog yakni antara Tionghoa melawan Dayak Kanayatan (Mandor), Dayak Bakati dan Dayak Sungkung.²¹

Pasca Kolonial.

Konflik antara Dayak-Tionghoa ini kembali terjadi pada tahun 1967. Waktu itu terjadi pengusiran besar-besaran orang Dayak terhadap warga Tionghoa di pedalaman Kabupaten Sambas, Kodya Pontianak, Sangau

dan Sintang. Hasil catatan Kodam VII Tanjungpura menyebutkan ada 55.521 orang Tionghoa yang dipaksa keluar oleh orang Dayak dari Pedalaman.²²

Tetapi pengusiran ini sangat terkait dengan peran dan mobilisasi TNI dalam 'menghancurkan' Partai Komunis Indonesia (PKI). Konflik yang sebetulnya merupakan usaha tentara menghabisi PKI, ditandai dengan usaha memanfaatkan orang Dayak. Etnisitas Dayak dimanfaatkan untuk mengusir Cina yang sudah ratusan tahun menetap di pedalaman.²³

Catatan selanjutnya adalah pertikaian antara Dayak dan Madura. Tercatat sejak tahun 1950 sampai 1999 telah terjadi 12 kali pertikaian antara Dayak dan Madura yang kesemuanya dipicu oleh tingkah orang Madura. Pemicunya adalah karena pencurian dan pembunuhan yang dilakukan orang Madura terhadap orang Dayak.²⁴

Pertikaian selanjutnya adalah antara Melayu dan Madura. Pada awalnya saudagar Bugis, Melayu dan Arab membawa orang Madura ke Kalimantan Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrakan dengan upah murah bahkan ada yang tidak dibayar. Warga Madura kemudian membuka hutan untuk dijadikan perkebunan dan ladang. Merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi, pada tahun 1933 pekerja Madura mengadakan pemberontakan di sekitar Kerajaan Sukadana (Ketapang). Pertikaian Melayu-Madura kembali terulang pada tahun 1999 yang berawal dari Desa Parit Seti. Pertikaian ini kemudian merembet ke Kota Pontianak yang menyebabkan sedikitnya 20.000 orang meninggal.²⁵

Selanjutnya adalah pertikaian Melayu dan Dayak. Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaka mendesak orang-orang Dayak masuk ke pedalaman sampai hulu-hulu sungai. Orang melayu yang beragama Islam meng-Islam-kan orang Dayak. Melayu bergandengan dengan Belanda menjajah Dayak. Pertikaian pernah terjadi ketika Melayu Silat di

bawah panembahan Mintcoek dan Melayu Selimbau menyerang orang Dayak Taman, Dayak Pekaki, Dayak Pajak dan Dayak Suhaid.

Peran Orde Baru

Kondisi itu diperparah pada masa pemerintahan Orde Baru, warga etnik Dayak dimobilisasi untuk mengusir Tionghoa pada tahun 1967. Penguasa beserta elit politik Jakarta melakukan eksploitasi sistematis berusaha menguras habis potensi Kalimantan Barat. Kayu hutan 'dijarah' oleh penguasa yaitu dengan dimunculkannya Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, sehingga penguasa dengan bebas dapat memberikan izin HPH kepada orang-orang yang 'dekat' dengan penguasa.²⁶

Eksplorasi hasil alam oleh pusat pada akhirnya menyebabkan termarginalnya warga Dayak baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial budaya. Warga Dayak menjadi miskin dan terus terbelakang karena lahan-lahan yang selama ini mereka huni 'diakui' sebagai kepunyaan negara. Masyarakat Dayak kehilangan hak penguasaan dan penggunaan tanah yang selama ini telah diakui dengan berlakunya hukum adat. Upaya 'penjarahan' tanah hutan itu dilakukan dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan perundangan antara lain Undang-undang Pokok Agraria, Kehutanan, Pertambangan.

Upaya lain yang dilakukan adalah pada tahun 1980 dengan memindahkan penduduk wilayah pedalaman menjadi sebuah komunitas yang menetap di suatu kawasan.²⁷ Dikatakan bahwa 77% dari 4362 desa di Kalimantan Barat berpenduduk kurang dari 100 rumah tangga. Setelah dilakukan pemindahan jumlah desa menjadi sangat sedikit yaitu 1297 desa. Tindakan tersebut dilakukan tentunya dengan maksud untuk memperluas daya jangkau 'tangan-tangan' pusat dalam mengeksploitasi Kalimantan Barat. Dengan begitu, secara

otomatis ketika wilayah-wilayah tersebut sudah tidak berpenghuni, akan dengan mudah penguasa mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada. Atas nama pembangunan dan modernisasi, negara telah melakukan eksploitasi atas Kalimantan Barat.

Orde Baru telah mendesain Kalimantan Barat hingga berubah total struktur sosialnya. Semula masyarakat yang dipimpin oleh kepala adat digantikan oleh kepala desa yang sekaligus menjadi kepanjangan tangan penguasa. Kondisi masyarakat menjadi tenang 'adem ayem', konflik mulai muncul antara Melayu-Dayak pada tahun 1999 ketika orang-orang Dayak menggugat komposisi anggota MPR RI dari Kalimantan Barat yang didominasi oleh orang-orang Melayu.²⁸

Konflik yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat merupakan akibat dari sistem sosial yang dipaksakan. Keberadaan etnis yang beragam, tidak dibarengi dengan pendidikan dan penyadaran serta komunikasi aktif antar etnis. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab konflik. Eksklusifisme yang dibangun oleh tiap-tiap etnis sangat besar. Tionghoa misalnya, yang menghuni wilayah-wilayah strategis perkotaan tidak berinteraksi aktif dengan masyarakat lain. Orang Dayak yang berada di pinggiran wilayah, bahkan di hutan-hutan menyebabkan mereka terisolasi dari informasi yang ada. Sedangkan orang Madura yang mayoritas bekerja sebagai petani dan kuli kasar, tidak mau melakukan interaksi dengan warga etnis lain. Orang Madura cenderung mengelompok dengan etnis mereka sendiri, bahkan tempat ibadah pun hanya untuk orang Madura sendiri.

Penguasa Orde Baru mempunyai peran dalam konflik yang terjadi. Upaya penyeragaman dengan dalih persatuan dan kesatuan telah mematikan hukum adat yang sebelumnya menjadi acuan hidup dan pola struktur sosial yang ada. Pemaksaan pola sosial menyebabkan adanya salah satu pihak masyarakat adat yang merasa

disingkirkan dan kehilangan kekuasaan. Tidak heran, kalau S. Djuweng menyebut pembangunan Orde Baru merupakan sebuah penindasan dan eksploitasi terhadap masyarakat adat di Kalimantan Barat, khususnya Dayak. Serangkaian kebijakan pemerintahan nasional telah diterapkan dan diberlakukan dengan cara represif dan pemaksaan atas nama pembangunan.²⁹

Usaha Resolusi Konflik³⁰

Berbagai upaya rekonsiliasi konflik telah dilakukan, Namun upaya-upaya tersebut selalu gagal karena dianggap menguntungkan salah satu pihak. Pada konflik 1998-1999 misalnya, Polisi sangat lemah dan terlambat. Mengenai keterlambatan aparat kepolisian dalam mengatasi konflik, diakui oleh Kapolda Kalbar saat itu, Kol. Pol Drs, Chaerul Rasyid, SH bahwa aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam menangani konflik. Personil yang sedikit dan massa yang beringas menyebabkan Polisi dalam posisi yang serba sulit.

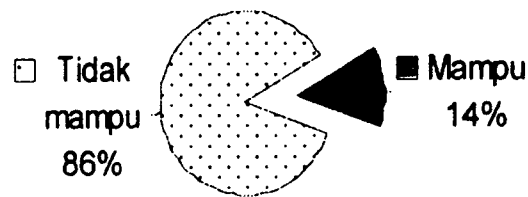
Raden "Wempi" Winata Kusumah sebagai pemangku adat kerajaan Sambas sangat menyesalkan kelambanan pihak Kepolisian dan aparat TNI ini. Mereka dinilai sangat tidak cekatan dalam menentukan sikap dan keputusan dalam menghadapi pertikaian yang terjadi. Padahal korban telah banyak berjatuhan.³¹ Menurut pemangku adat Dayak Sambas Libertus Ahie, Polisi sangat lamban dalam menangani konflik ini. Aparat Kepolisian tidak sigap dengan mendatangi warga dan memberikan penerangan kepada mereka.

Lemahnya Aparat Polisi

Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Pusham UII terhadap warga Pontianak. Sebagian besar responden (86.15%) menilai bahwa polisi

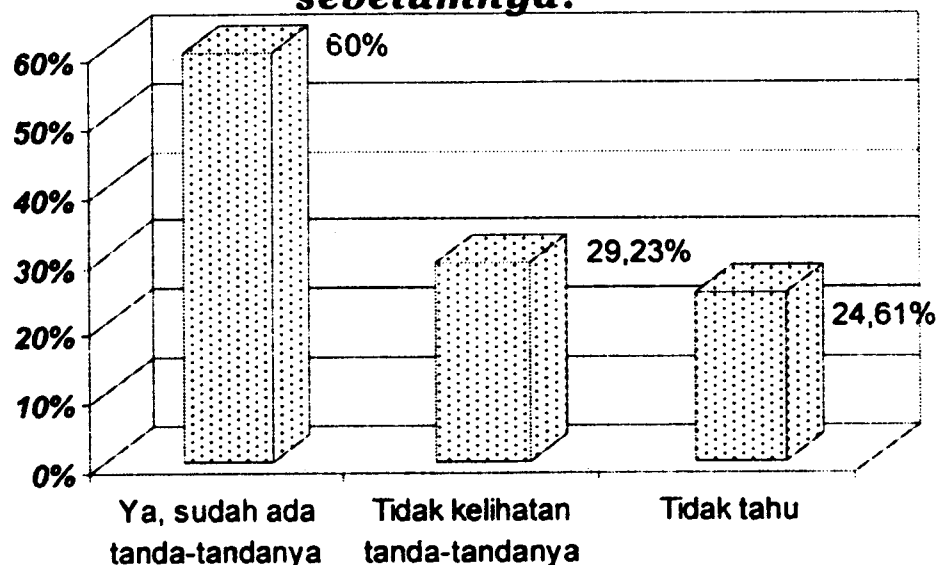
tidak mampu menangani konflik tersebut. Detilnya lihat tabel 1 di bawah.

Kemampuan polisi dalam menangani kerusuhan

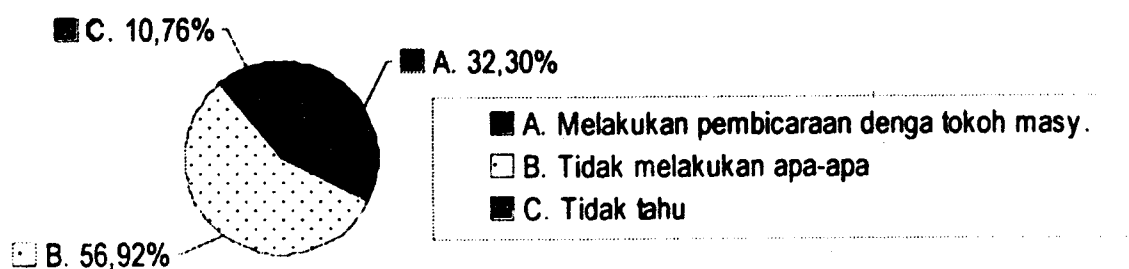


Padahal, sebagian besar responden (60%) sudah menangkap akan adanya gejala dan konflik yang membesar menjadi kerusuhan. Kepolisian, lagi-lagi dinilai tidak melakukan apa-apa. Lihat tabel 2 dan 3 di bawah.

Apakah gejala kerusuhan sudah nampak sebelumnya?

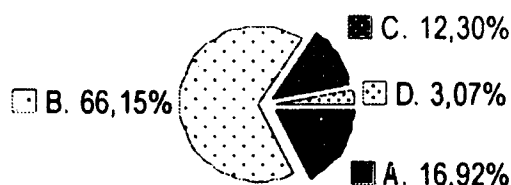


Apa yang dilakukan Polisi setelah mengetahui gejala kerusuhan tersebut?



Pasca kerusuhan, Polisi pun tidak melakukan proses penyelesaian yang penting, yaitu dengan cara menggalang proses pendekatan resolusi yang berbasis pada masyarakat dan tokoh-tokohnya. Polisi, secara umum hanya melakukan patroli dan mengantisipasi dari jarak yang 'jauh'. Berikut penilaian responden kami.

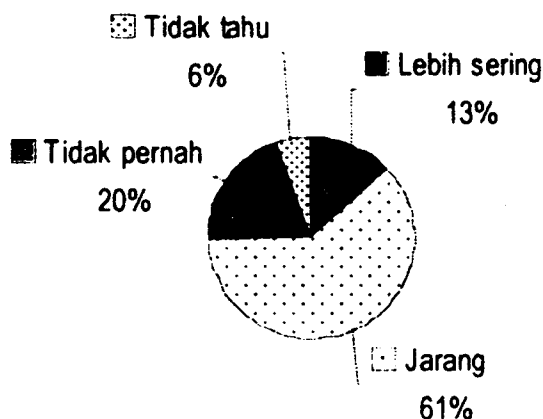
Apa tindakan Polisi setelah terjadi kerusuhan?



- A. Patroli siang malam, sambil mendatangi dan berbicara dengan warga untuk menerangkan
- B. Patroli siang malam, tapi tidak mendatangi dan berbicara dengan warga untuk menerangkan
- C. Tidak melakukan apa-apa
- ▣ D. Tidak tahu

Pasca kerusuhan, hubungan Polisi dan masyarakat juga tidak menunjukkan pola relasi yang bisa mendekatkan mereka ke arah kerjasama yang signifikan untuk menghadapi potensi dan perkembangan konflik di masyarakat. Hampir tidak ada komunikasi dan inisiatif aparat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. di antara masyarakat. Secara detil lihat tabel di bawah.

Komunikasi Polisi dengan masyarakat setelah kerusuhan



Kami juga melakukan wawancara kepada sejumlah personel polisi. Ternyata mereka juga memberi jawaban yang cukup sinkron dengan kesan dan persepsi masyarakat di atas. Salah seorang personel mengatakan, "Tugas Polisi itu standar, yaitu melakukan penanggulangan dan pencegahan. Pada waktu awal-awal kejadian kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, tetapi karena wilayah Kalbar cukup luas, sementara jumlah aparat terbatas, upaya kami tidak maksimal." Tindakan pencegahan yang mereka maksud adalah bahwa mereka mencoba melokalisir wilayah konflik, menenangkan massa dan mengajak bicara tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing suku. Namun usaha ini gagal terbukti dengan keadaan yang tidak membaik.

Beberapa personel juga menilai adanya sinyalemen bahwa TNI berperan dalam konflik antarsuku itu. Dengan hati-hati, salah seorang berkata, "Wah, kalau itu saya gak tahu, tetapi kalau melihat keadaan di medan konflik, dimana kedua belah pihak ada yang punya senjata organik TNI, mungkin saja hal itu ada."

Peta Persoalan COP

Studi ini, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan orientasi kepada aparat Kepolisian di Kalbar, dalam melakukan tugas 'patriotik'-nya dengan paradigma baru. Paradigma *Community Oriented Policing*. Peta persoalan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak menjadi sangat penting untuk ditegaskan dalam riset ini.

Penyelundupan

Selain permasalahan konflik antar suku di Kalimantan Barat, satu permasalahan besar yang lain adalah penyelundupan kayu. Menurut sejarahnya, tempat

yang selama ini dihuni oleh komunitas Dayak menjadi sempit karena terjadi penjarahan hutan. Bahkan penjarahan itu dilakukan sejumlah perusahaan HPH yang di-backing oleh aparat dan pemerintah.

Salah satu kasus penyelundupan kayu terbesar yang sempat muncul pada masa reformasi adalah kasus kapal M. Klover.³² Peristiwa itu terjadi pada tanggal 31 Mei 2000. Ketika itu ada kerjasama antara sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Front Mahasiswa Indonesia Wilayah Kalimantan Barat (FMIK). Aktivis dari LSM memberikan informasi kepada para aktivis mahasiswa bahwa ada satu kapal Motor Clover yang mengangkut kayu ilegal sedang berlabuh di pelabuhan Pontianak dan rencananya akan berlayar alam harinya.

Malam harinya, sekitar 4 sampai 5 mahasiswa menuju lokasi untuk melakukan investigasi namun mereka dicegat oleh aparat dan tidak diperbolehkan masuk ke arena pelabuhan. Para aktivis mahasiswa kemudian pulang dan kembali ke pelabuhan dengan mengajak sekitar 35 mahasiswa. Akhirnya mereka diperbolehkan masuk ke pelabuhan. Ke-35 aktivis mahasiswa tersebut berhasil menduduki kapal menunda pemberangkatan, yang seharusnya jam 11 malam, hingga pagi hari. Tidak petugas pelabuhan ataupun nahkoda kapal, yang dapat menunjukkan kelengkapan dokumennya.³³

Kasus KM. Clover hanya satu diantara sekian banyak kasus penyelundupan kayu yang terjadi di pelabuhan Pontianak. Sekian tahun mahasiswa berusaha untuk mengungkap penyelundupan kayu di Kalimantan Barat, baru dalam kasus ini mereka mendapatkan kemenangan dengan mengungkap penyelundupan ini. Kasus KM. Clover hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa yang telah menjadi rahasia umum. Kasus penebangan kayu hutan secara ilegal telah berlangsung lama, terutama sejak orde baru berkuasa. Penebangan kayu secara ilegal merupakan fenomena sosial yang dapat dijumpai hampir

setiap saat. Datangnya era orde baru membawa model baru dalam penebangan kayu hutan, penguasa saat itu secara korup telah memabat hutan dengan dalih demi kepentingan negara.

Seringkali pemerintah melemparkan stigma dan kebijakan 'rasis' yang menyebut masyarakat lokal di pedalaman sebagai suku terasing, peladang perambah hutan dan istilah-istilah lain yang menggambarkan betapa terbelakangnya masyarakat di pedalaman Kalimantan. Bedanya antara penguasa pada era orde baru dengan penebang liar adalah bahwa penebang liar melakukan penebangan secara liar dan ilegal murni tanpa ada instrumen pembeda yang dapat dijadikan legitimasi perilakunya, sedangkan penguasa orde baru melakukan penebangan hutan dengan menggunakan kekuasaannya sebagai instrumen legitimasi atas tindakannya. Penguasa menggunakan segala potensi kekuasaannya baik yang ada pada lembaga legislatif, yudikatif apalagi eksekutif untuk mengambil paksa kekayaan hutan yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Kuatnya birokrasi pada masa orde baru menjadikan kasus penyelundupan kayu selama ini tidak dapat diusut. Semua jalan yang dilalui untuk penjualan kayu telah tertata secara rapi sehingga menyulitkan bahkan menjadi penghalang bagi para pihak yang akan melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut.

Kasus KM. Clover misalnya, betapa para aktivis mahasiswa mendapatkan kesulitan luar biasa untuk dapat menduduki kapal yang mengangkut ribuan kubik kayu yang akan dijual secara ilegal. Mahasiswa harus berhadapan dengan para preman yang disewa pihak pelabuhan yang mengaku dirinya adalah buruh angkut pelabuhan. Selain berhadapan dengan para preman, mahasiswa harus berhadapan dengan aparat birokrasi yang dengan rapi berusaha menutup-nutupi kasus yang akan diungkap oleh para mahasiswa.

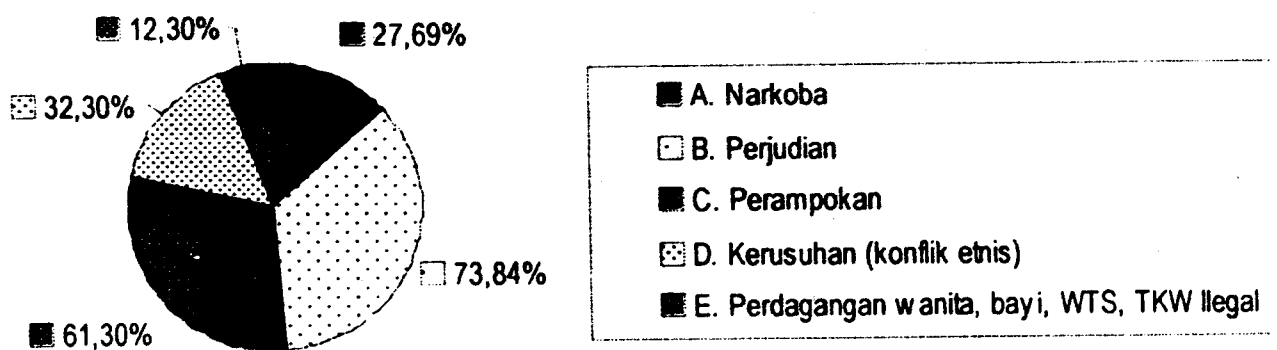
Aparat kepolisian yang menjadi tumpuan masyarakat dalam penegakan hukum pun tidak mendukung gerakan para mahasiswa bahkan cenderung mendiamkan. Sampai-sampai mereka harus menyadera para pihak yang berkompeten dalam mengenai kasus tersebut di gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyanderaan itu, para mahasiswa menahan pejabat-pejabat pemerintahan di Pontianak dan kepala Bea dan Cukai HJ. Namun karena menghadapi ancaman serbuan oleh polisi, maka para sandera akhirnya dibebaskan.³⁴

Mampukah aparat kepolisian di masa reformasi ini membongkar 'mafia' kayu yang melibatkan birokrasi dan aparat negara di Kalimantan Barat?

Masalah Sosial dan Keamanan

Selain penyelundupan kayu, masih banyak lagi permasalahan sosial yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan penelitian terhadap responden, ditemukan ada beberapa macam permasalahan sosial lain yang ada di Kalimantan Barat, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat



Permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak adalah perdagangan anak dan wanita serta kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Bantuan Hukum untuk Keadilan Pontianak (LBH PIK) mencatat dalam tahun 2003 terjadi 308 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.³⁵ Artinya hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari 308 kasus tersebut, 132 kasus diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, 93 kasus pemerkosaan, 59 kasus pencabulan, 19 kasus perdagangan anak dan perempuan serta enam kasus pelecehan seksual.³⁶

Khusus untuk perdagangan manusia, kasus yang banyak terjadi adalah penjualan manusia dengan tujuan Malaysia. Pada awalnya perempuan penganggur di daerah-daerah Kalimantan Barat ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga atau sebagai penjaga toko, namun setelah sampai di Malaysia mereka kemudian diserahkan kepada calo atau geromo yang akan menjual mereka kepada para lelaki hidung belang di Negeri Jiran tersebut. Jalur perdagangan mereka adalah melalui Pontianak-Sarawak. Sedangkan penjualan para TKI ini dilakukan di Kuala Lumpur dan Kuching.³⁷

Permasalahan ini dibenarkan oleh para Polisi di Pontianak. Ketika ditanya mengenai permasalahan sosial yang ada di Pontianak, mereka menjawab bahwa secara umum di seluruh Kalimantan Barat hampir sama, yaitu kriminalitas, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, perjudian, perang tanding antarsuku dan minum-minuman keras. Tetapi kalau di kotamadya Pontianak yang menonjol, yaitu perjudian, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan minuman keras.

Para Polisi yang kami wawancarai menuturkan bahwa latar belakang dan kondisi sosial yang menonjol adalah kesenjangan ekonomi. Di Kalimantan Barat tingkat

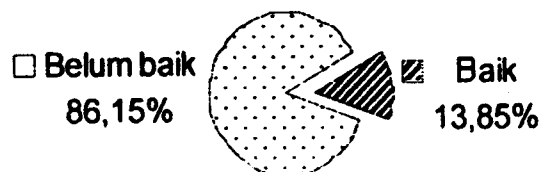
kesenjangan ekonomi cukup tinggi, dan banyak pengangguran. Sedangkan gangguan sosial yang sifatnya SARA, dikarenakan heterogenitas suku, agama, bahasa dan budaya yang sangat berbeda.³⁸

Polisi di mata Masyarakat

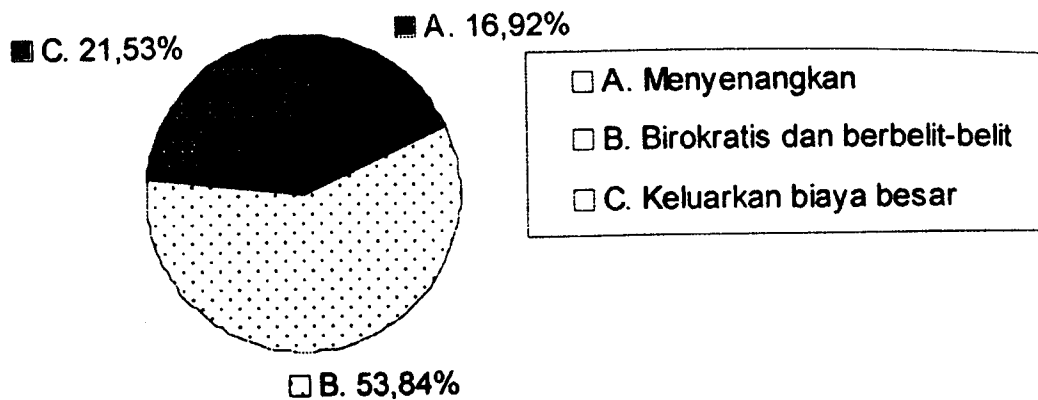
Penelitian singkat di Pontianak ini mengangkat topik yang penting, yaitu bagaimana persepsi dan penilaian masyarakat tentang polisi. Citra dan kesan masyarakat yang menjadi responden, cukup menyedihkan.

Dari tabel dibawah, diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat menganggap polisi belum baik. Hal itu terlihat pada besarnya prosentase masyarakat yang mengatakan bahwa citra polisi belum baik yaitu sebesar 86.15 %. Mekanisme yang sangat birokratis dan berbelit-belit merupakan pengalaman yang buruk, yang dialami mereka (sebesar 53.84 %) ketika berhubungan dengan polisi. Alasan lain dari buruknya berhubungan dengan aparat adalah harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Bahkan ada responden yang menuturkan bahwa kalau ada polisi mendatangi sebuah toko milik orang Cina di Pontianak, maka serta merta ia disambut hangat, dan sebuah amplop berisi rupiah sudah tersedia. Kalangan Cina boleh dikata menjadi sumber pundi-pundi yang 'vital' bagi aparat.

Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi

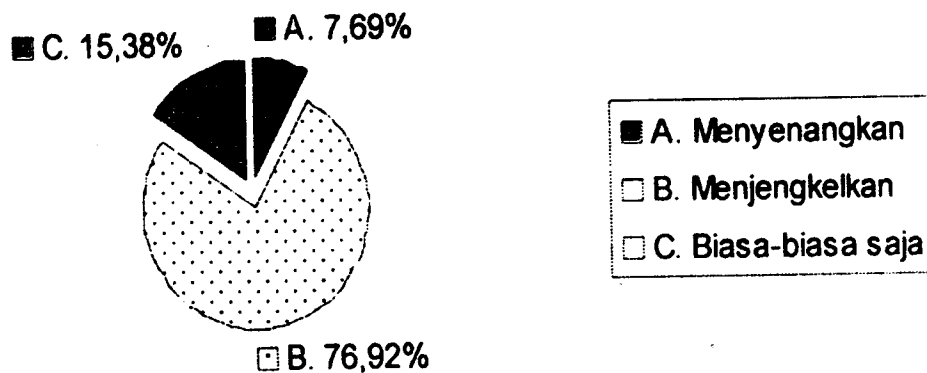


Pengalaman masyarakat berhubungan dengan polisi



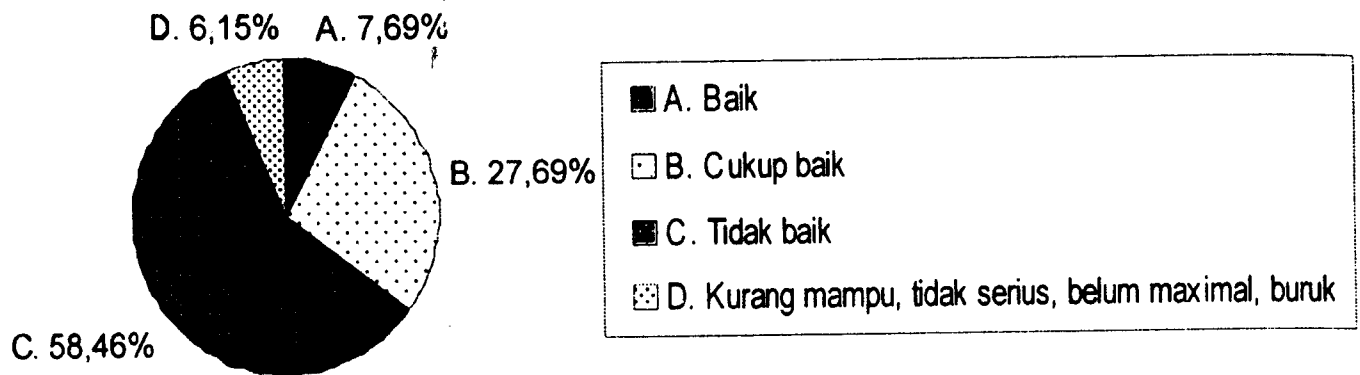
Akibatnya, sebagian besar responden, mengalami pengalaman yang menjengkelkan dengan Polisi. Tabel di bawah ini, memperlihatkan betapa menjengkelkannya Polisi di Pontianak. Mereka yang merasa sedang hanya sedikit.

Kesan masyarakat setelah berhubungan dengan Polisi

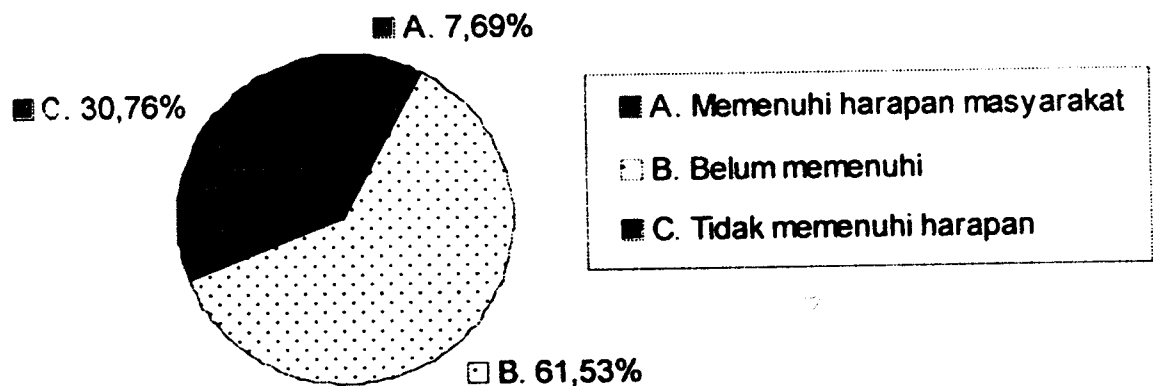


Sebagai penegak hukum, oleh masyarakat, Polisi dirasa belum baik dalam menangani kejahatan. Sebanyak 58.46 % responden mengatakan bahwa Polisi tidak baik dalam menegakkan hukum. Secara umum, Polisi dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari hasil polling sebagai berikut:

Kemampuan Polisi sebagai Penegak Hukum



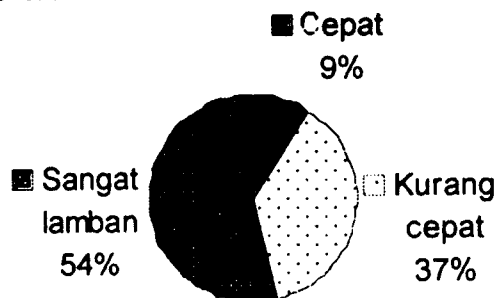
Peran Polisi dalam Menangani Kejahatan



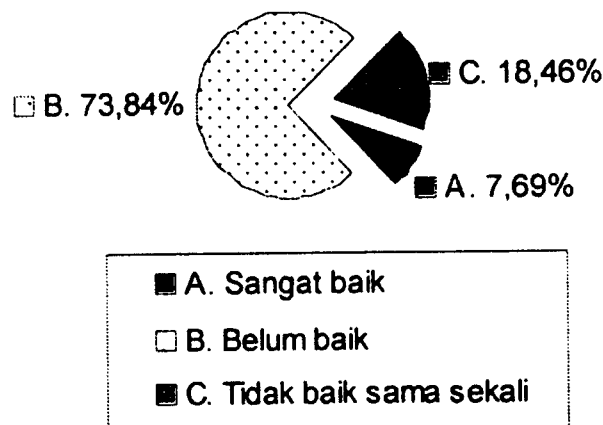
Kurangnya Pelayanan

Bagi masyarakat yang menjadi responden Pusham di Pontianak, pelayanan polisi cukup buruk. Penilaian para responden mencakup bagaimana sikap dan respon polisi dalam menerima laporan masyarakat, bagaimana peran polisi dalam menangani masalah lalu lintas.

Sikap polisi dalam menerima laporan masyarakat



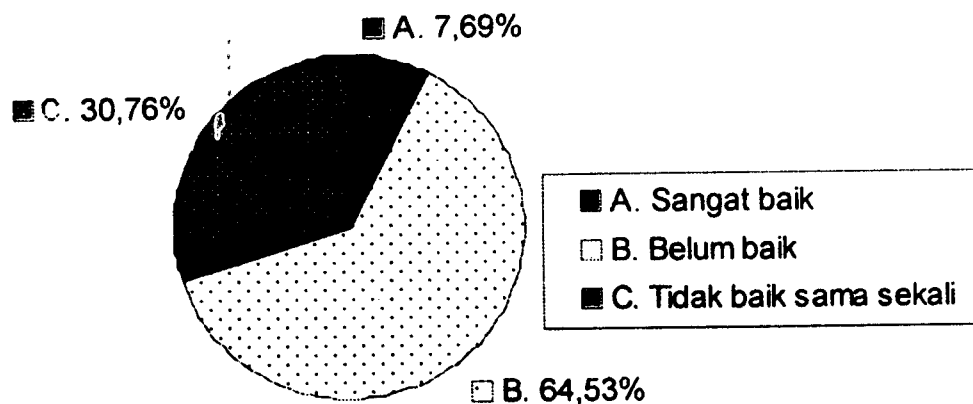
Peran Polisi dalam menangani lalu lintas



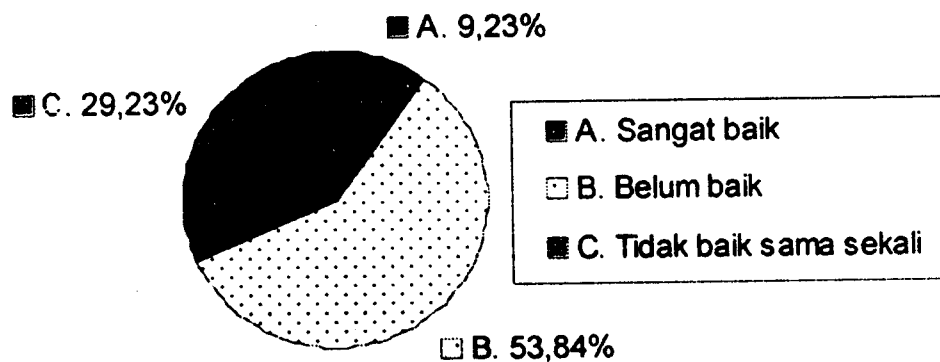
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat menilai bahwa Polisi juga belum memenuhi harapan masyarakat dalam hal menangani kejahatan. Hal itu terlihat dari hasil polling yang menunjukkan bahwa 61.53% responden mengatakan bahwa Polisi belum memenuhi harapan masyarakat dalam menangani kejahatan. Bahkan 53.84% responden mengatakan bahwa Polisi sangat lamban dalam menangani laporan dari masyarakat. Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar masyarakat yaitu 73.84 % responden mengatakan bahwa Polisi belum baik dalam menanganinya. Pencegatan untuk mencari 'uang tambahan' bagi oknum dan bawahan polisi Pontianak juga sering terjadi.

Polisi juga dinilai tidak berhasil dalam membantu masyarakat rentan dan menangani aksi massa, hasil penelitian menunjukkan hal tersebut. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

***Peran Polisi dalam menangani kelompok rentan
(anak, wanita, orang cacat)***



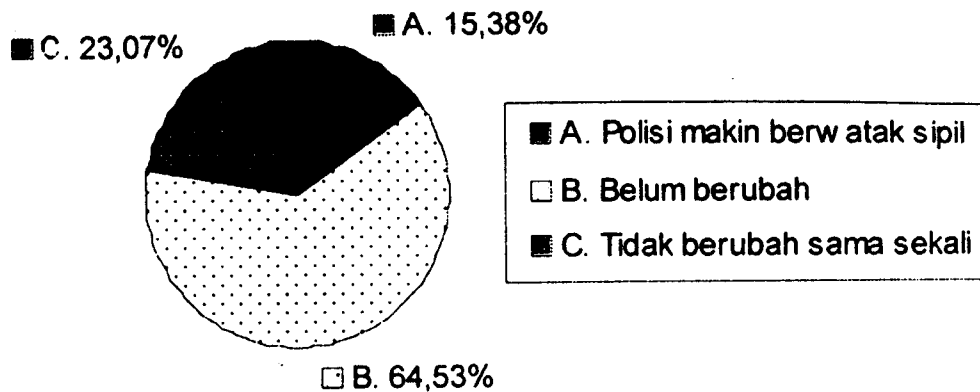
Peran polisi dalam menangani aksi masa



Dari kedua table di atas terlihat bahwa masyarakat merasa Polisi belum baik dalam menangani kelompok rentan (wanita, anak-anak, orang cacat), yaitu sebanyak 64.53 % responden. Dalam menangani aksi masa, polisi juga dianggap belum baik dalam menanganinya yaitu sebanyak 53.84 %.

Perubahan status dari TNI menjadi sipil tidak membawa perubahan yang signifikan pada diri Polisi. Hal tersebut dapat diketahui dari persepsi masyarakat bahwa masyarakat menganggap tidak ada perubahan yang signifikan antara Polisi di bawah TNI maupun setelah lepas dari TNI. Sebanyak 64.53 % responden mengatakan hal tersebut. Tabelnya sebagai berikut.

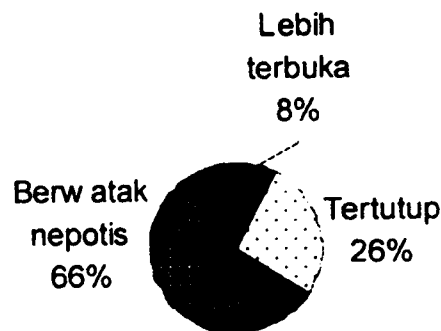
Perubahan Polisi setelah Lepas dari TNI



Reformasi Polisi.

Kepada responden, juga dimintai tanggapannya tentang proses rekrutmen anggota Polri. Hasilnya cukup mengagetkan, kecenderungan KKN di tubuh Polri, dalam 'kacamata' para responden, cukup kental. Table di bawah ini, tentu akan menambah daftar citra buruk aparat di Kalimantan Barat.

Proses rekrutmen polisi

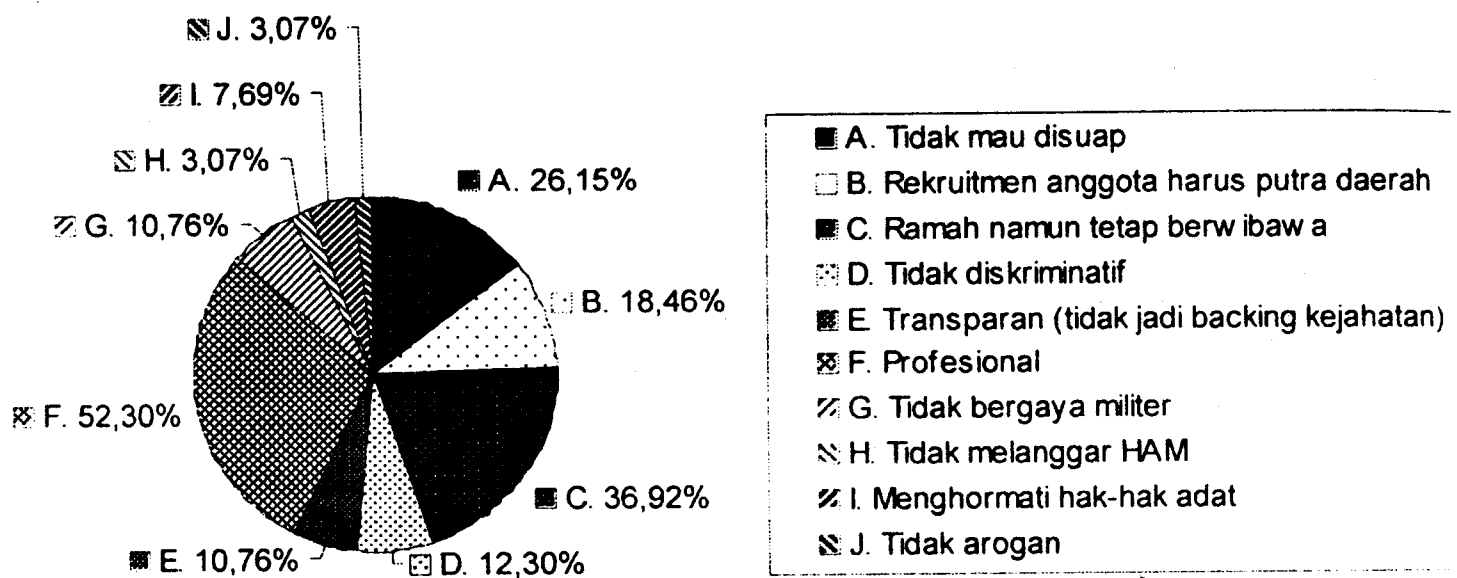


Tentu saja, sumber daya aparat yang dihasilkan dari sebuah praktek suap, akan melahirkan aparat yang juga bermental suap-menyuap. Agenda mengurangi, kalau tidak bisa dihapus, tradisi suap dan korupsi di internal Kepolisian merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan untuk dilakukan. Rasa hormat dan bangga masyarakat, dapat lahir dari keteladanan yang diberikan aparat penegak hukum ini.

Aparat Kepolisian juga mengakui bahwa hubungannya dengan masyarakat tidak baik, ketika para polisi ditanya bagaimana hubungan Polisi dan Masyarakat di Pontianak? Mereka menjawab "Harus kami akui bahwa hubungan Polisi dan masyarakat di Pontianak tidak baik, saling curiga! Barangkali hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat kepada Polisi terlalu negatif, sehingga kami sangat kesulitan membangun hubungan". Para Polisi juga mengatakan bahwa selama ini persepsi masyarakat terhadap Polisi bahwa Polisi itu suka menganiaya, suka memeras atau melakukan pungutan liar.

Kepada para responden, kemudian dimintai usulan tentang hal-hal yang bisa diperbaiki dari institusi Kepolisian di Pontianak. Hasilnya adalah seperti table di bawah.

Usulan masyarakat untuk perbaikan citra Polisi



Dari tabel di atas, sebagian besar menginginkan Polisi bertindak profesional yaitu 52.30 % dan bersikap ramah yaitu sebanyak 36.92 %. Selain itu masyarakat menginginkan agar Polisi tidak gampang disogok atau bahkan meminta suap, terutama dalam menangani lalu

lintas (26.15 %). Hal yang menarik lagi adalah bahwa masyarakat menginginkan agar rekrutmen Polisi dilakukan dengan mendahulukan putra-putra daerah, bahkan secara eksplisit mereka mengatakan bahwa kebanyakan polisi masih didominasi orang Jawa.

Membangun Kerjasama Masyarakat-Polisi

Ada baiknya, kita melihat komentar salah seorang responden, yang menulis dalam kertas quisioner.

“Selama ini, institusi Kepolisian menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjengkelkan. Sebagian besar oknum Polisi bersikap arogan dan sok kuasa. Seringkali oknum-oknum ini melanggar aturan sendiri, misalnya lalu lintas, karena merasa aparat negara, seenaknya saja melanggar lampu merah. Di Pontianak, masyarakat paham betul bahwa kalau sudah akhir bulan, razia kendaraan bermotor akan lebih banyak, karena polisi sering kali cari uang melalui denda bagi yang tidak membawa SIM atau STNK. Waktu diminta surat tugasnya, mereka tidak dapat menunjukkan. Meski begitu ada juga Polisi yang baik.”

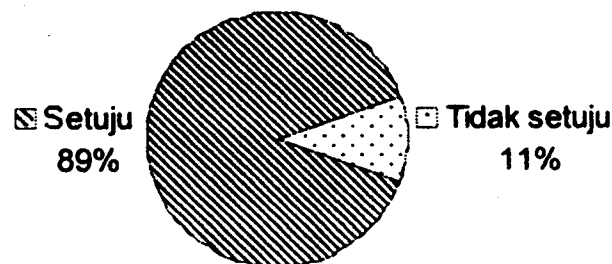
Beberapa personel dan perwira Kepolisian di Pontianak juga mengaku ada usaha-usaha yang sudah, sedang atau akan dilakukan untuk memperbaiki hubungan Polisi dan masyarakat. Proses ini sesuai dengan komitmen mereka dengan paradigma baru Polri. Dalam artian bahwa Polri harus menjalin kerjasama yang padu dan terbuka dengan masyarakat. Antara masyarakat dan Polri itu merupakan kekuatan bersama dalam menjaga kamtibmas. Hubungan atasan dan bawahan dalam struktur Polisi tidak lagi komando seperti di TNI.

Ketika ditanyakan mengenai pola komando yang selama ini dijalankan, apakah masih dijalankan atau telah dihilangkan, ada yang menjawab, “Wah menghilangkan itu sulit mas, kita kan sudah 30 tahun lebih berada dalam

struktur TNI sehingga pengaruhnya belum kelihatan. Kita masih juga memanggil DAN (Komandan) tiap kali ketemu. Kita belum terbiasa memanggil PAK, dan kelihatannya Komandan juga gak begitu suka dengan panggilan PAK. Sehingga menurut saya hubungan model TNI itu masih akan berlangsung lama, mungkin 20 tahun lagi baru hilang.”

Harapan untuk membangun kerjasama polisi dan masyarakat, memang ada. Sebagian besar responden menginginkan kerjasama ini, 89% menyatakan kesanggupannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam kantibmas ?



Kerjasama yang terbuka dan saling mendukung merupakan kunci yang utama dalam membangun COP di Pontianak. Hal ini ditegaskan oleh 93.84% responden. Dari pihak kepolisian yang ditemui juga menginginkan hubungan yang terbuka, dan kuncinya komunikasi.³⁹ Tetapi butuh waktu karena jumlah polisi masih terbatas, masalah geografis yang sukar terjangkau.

Kesimpulan

Mengacu pada persoalan yang dialami oleh masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya, dari uraian diatas, akan ada beberapa kesimpulan yang kami pandang merupakan sangat penting untuk dijadikan pijakan program *Community Oriented Policing* di Pontianak dan Kalimantan Barat.

Pertama, problem keamanan paling mendasar yang

dialami masyarakat adalah dampak konflik antaretnis beberapa waktu lalu. Potensi konflik dan perkelahian massa akan bisa timbul sewaktu-waktu, dengan berbagai macam pemicu dan akar yang beragam. Konflik sosial bisa meletus setiap saat, baik dalam skala kecil maupun besar. Stigma dan stereotipe antaretnis masih berlangsung dalam kehidupan mereka yang tampak aman dan tenang.

Kedua, problem keamanan struktural, berupa konflik vertikal antara masyarakat adat Dayak, masyarakat lokal Melayu, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, yang berakibat pada isu-isu tanah, lingkungan dan adat istiadat. Dalam banyak kasus, aparat justru tidak bersikap netral, malah melakukan penyiksaan terhadap warga yang melakukan protes.⁴⁰ Problem keamanan struktural lainnya seperti kasus-kasus *illegal logging*, penjarahan kayu, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH, yang bekerjasama secara illegal dengan sejumlah pejabat terkait, melalui korupsi dan suap-menyuap yang sudah mengakar kuat di birokrasi Kalimantan Barat.

Ketiga, berupa problem keamanan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan perdagangan perempuan, perjudian, dan berbagai tindak kriminal lainnya, yang disebabkan oleh banyak hal di antaranya karena kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Rekomendasi

Reformasi Polisi di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak memang bukan pekerjaan mudah. Melihat uraian panjang lebar dan kesimpulan di atas, setidaknya ada tiga hal yang menjadi rekomendasi tulisan ini, untuk program *Community Oriented Policing* di Kalimantan Barat:

Pertama, Program COP dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aneka permasalahan sosial yang

sangat kompleks di Kalimantan Barat. Di antara perkembangan tersebut adalah konflik dan ketegangan antaretnis yang belum tuntas secara sosio-kultural. Program ini dijalankan dengan berbasis pada pengembangan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menangani berbagai masalah sosial yang ada. Pelibatan masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat adat yang selama ini telah dipinggirkan bahkan dihilangkan perannya. Komunikasi yang selama ini dapat dikatakan terputus antara masyarakat dengan polisi harus dibuka kembali. Dalam hal ini, aparat polisi bisa diposisikan sebagai 'mediator' dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai kecenderungan konflik. Dengan kata lain, COP bisa berpegang pada 'paradigma resolusi konflik' untuk aparat polisi.

Kedua, hasrat masyarakat untuk menghapus atau mengurangi korupsi di birokrasi Kalimantan Barat, dan juga di internal kepolisian, perlu diperhatikan dengan langkah-langkah dan tindakan kongkrit aparat untuk berpihak kepada mereka dan tidak menunjukan dedikasinya pada 'pundi-pundi' dari berbagai praktek suap, sogok, penjarahan hutan dan semacamnya. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan terbangun dari stand poin ini: Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum. COP dengan demikian bisa berpijak pada paradigma 'Polisi-Masyarakat anti Korupsi'.

Ketiga, program COP di Kalimantan Barat juga merupakan sarana dan alat kerjasama yang efektif untuk menanggulangi problem keamanan dan kamtibmas di masyarakat. Kasus-kasus pidana dan hukum yang terjadi bisa diselesaikan melalui instrumen hukum adat, dan norma-norma kultural yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, selain menjalankan penegakkan hukum positif yang formal, aparat Polisi juga bisa dikembangkan sebagai penegak hukum informal, yang berpihak pada masyarakat

luas. Dengan kata lain, COP membutuhkan 'polisi kultural', yakni aparat yang berperan menegakkan norma-norma, adat-istiadat dengan pendekatan kultural di masyarakat.

- 1 Semula kota ini merupakan ibukota kerajaan Pontianak yang didirikan oleh warga keturunan Arab. Komposisi penduduknya (Laporan As.Ter.Kodam XII Tanjungpura 1980/1981) adalah Melayu (39,72 %), Bugis (20,39 %), Jawa (18,34 %), Madura (13,09 %), Batak (2,48 %), Banjar (1,53 %), Minangkabau (1,5 %), Dayak (1,42 %), Sunda (1,09 %), Manado (0,2 %), Ambon (0,19 %), Bali (0,03 %), Aceh (0,01 %) dan Sangir Talaud (0,01 %). Tentunya data ini sudah berubah sekarang.
- 2 Selain kayu, propinsi ini mempunyai flora yang khas antara lain anggrek hutan, berbagai tanaman hias dan yang paling mencolok adalah pinang merah. Di samping itu terdapat bermacam-macam tanaman pertanian dan perkebunan. Fauna terkenal dan dilindungi yang tinggal di hutan Kalimantan Barat antara lain orang utan, kukang, kelempiau, bekantan, rusa, burung enggang, trenggiling, burung dara laut, bangau tongtong, harimau dahan, beruang madu dan kancil. Lihat dalam <http://pontianak-online.com/equatopedia/fisiografi/>
- 3 <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/dayak.htm>
- 4 *Ibid*
- 5 <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/melayu.htm>
- 6 <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/cina.htm>
- 7 *Ibid*
- 8 *Ibid*
- 9 *Ibid*
- 10 *Ibid*
- 11 <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/madura.htm>
- 12 *Ibid*
- 13 <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/bugis.htm>
- 14 *Ibid*

- 15 Edi Petebang & Eri Sutrisno, *Konflik Etnik di Sambas*,
 hlm116
- 16 Hedro Suroyo Sudagung, *Mengurai Pertikaian Etnis,
 Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat*,
 hlm. xix
- 17 Edi Petebang & Eri Sutrisno, *Op. Cit.* hlm131
- 18 *Ibid.* hlm. 200
- 19 Edi Petebang & Eri Sutrisno, *Op. Cit.* hlm. 198-204
- 20 *Ibid.* hlm. 198
- 21 *Ibid.* hlm. 199
- 22 *Ibid.* hlm. 200
- 23 John Bamba, *The Role of Adat in The Dayak and
 Madurese War*, dalam [http://www.dayakology.com/
 publications/articles_news/eng/role.html](http://www.dayakology.com/publications/articles_news/eng/role.html), h. 4. Pola
 TNI menghancurkan PKI di Kalimantan ini, persis sama
 dengan pola yang dilakukan di Jawa Timur, dimana NU
 (Banser) dimanfaatkan untuk membunuh orang-orang
 PKI. Di Kalbar, Orang-orang Dayak dimanfaatkan untuk
 mengusir dan membunuh orang-orang Cina.
- 24 *Ibid.* hlm. 201
- 25 *Ibid.* hlm. 203
- 26 *Ibid.* hlm. 203
- 27 Hedro Suroyo Sudagung, *Op. Cit.* hlm. xx
- 28 Edi Petebang & Eri Sutrisno, *Op. Cit.* hlm. 204
- 29 Lihat S. Djuweng, *Pembangunan dan Penindasan,
 Pelajaran dari Masyarakat Dayak*, dalam [http://
 www.dayakology.com/publications/articles_news/ind/
 pembangunan.html](http://www.dayakology.com/publications/articles_news/ind/pembangunan.html), h. 3-4. Selama masa pemerintahan
 Orde Baru, apa yang disebut pembangunan kebudayaan
 memiliki tiga ciri utama: pertama, budaya dipersempit
 hingga menjadi seni budaya, kedua, pengembangan
 budaya harus berorientasi kepada dunia bisnis
 (komersial), ketiga, pertunjukkan seni budaya harus
 sejalan dengan kemauan pemerintah. Dengan demikian
 telah terjadi pendangkalan-pendangkalan nilai, bentuk,
 fungsi dan makna kebudayaan. Seiringan dengan itu telah
 pula terjadi pasungan, pemerkosaan, dan dominasi
 terhadap budaya-budaya etnik di Indonesia. Di beberapa
 tempat di Kalbar, penyelenggaraan pesta kawin,
 pelantikan belian, upacara adat harus terlebih dahulu

mendapat ijin lisan dari Kepolisian. Ijin lisan itu berharga Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah). Ibid. h. 5

30

Ada satu ceritera menarik sebagai bahan untuk merumuskan resolusi konflik bahwa tidak terjadinya konflik antara Dayak dan Melayu disebabkan adanya cerita rakyat yang diyakini kebenarannya oleh kedua etnis ini bahwa kedua etnis ini masih terikat dalam darah yang sama. Cerita tersebut adalah bahwa suatu ketika manusia masih langka, terdapatlah seorang bernama Aji Manthelok yang mempunyai dua anak, kedua anak tersebut dipisah tempatnya karena mereka berlainan jenis yang bernama Karanamuna dan Karanamuning yang dalam edisi Melayu Ketapang dikenal dengan sebutan Putri Junjung Putih dan Betung Tujuh Ruas. Singkat cerita, setelah dewasa mereka dikawinkan dan mempunyai tujuh anak, tujuh anak ini dititipkan oleh Karanamuna dan Karanamuning kepada Patara Guru sedangkan mereka sendiri menghanyutkan diri ke sungai. Oleh Patara Guru ketujuh anak ini dimasukkan ke dalam betung tujuh ruas dan ditaruh di ladang. Ketika raja Siak Bulun menemukan betung tersebut dan membelahnya, maka keluarlah tujuh anak tersebut. Anak tertua bernama Tamongong (Dayak Krio: Kepala adat) Ria Bansa, dan terakhir bernama putri Dayang Kutong. Pada akhirnya Dayang Kutong ini dipercaya menurunkan raja-raja Melayu sedangkan Tamongong Ria Bansa bermukim di daerah hulu sungai Krio dan menjadi raja di Hulu Aik yang menurunkan warga etnik Dayak. Maka kemudian Melayu dan Dayak menganggap mereka adalah saudara, bahkan sampai saat ini masih banyak orang Melayu yang memanggil orang Dayak "abang" (saudara tua). Ibid. hlm. 126. Cerita ini menunjukkan secara "romatik" bahwa etnis besar Melayu-Dayak berasal dari satu keturunan dan merupakan saudara satu sama lain. "Mitos" seperti ini perlu dikembangkan untuk menghapus "jejak" dan ingatan masyarakat tentang konflik.

31

Ibid. hlm. 25

32

Jim Schiller (Editor), *Op. Cit.* hlm. 323

33

Ibid. hlm. 324

34

Ibid. hlm. 325

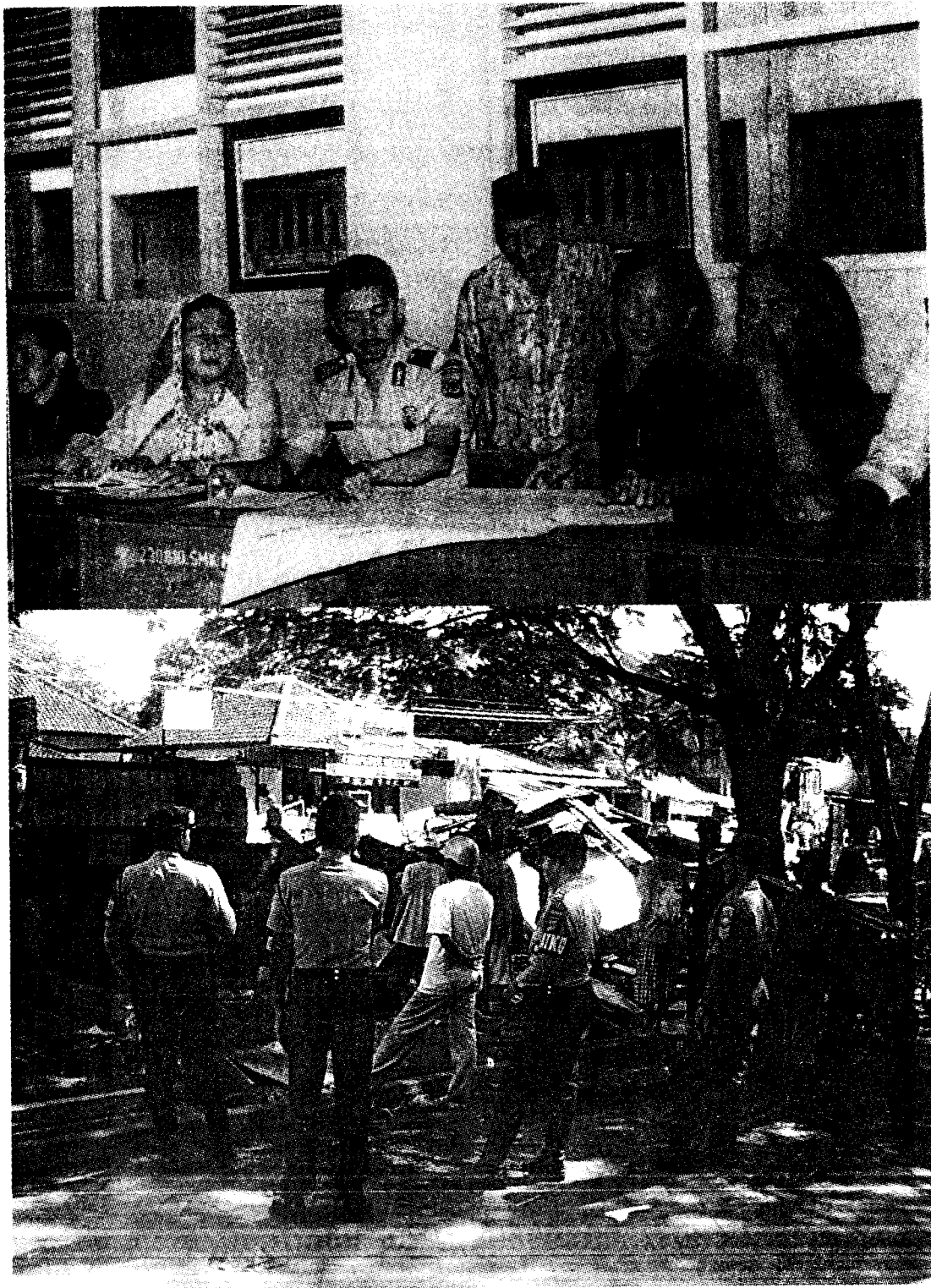
- 35 Kompas, Senin 8 Februari 2004
- 36 *Ibid*
- 37 *Ibid*
- 38 Lebih lanjut para polisi mengatakan bahwa latar belakang SARA ini dapat dijelaskan bahwa di Kalbar ini ada tiga suku besar, yaitu Melayu, Dayak dan Madura. Sedang suku-suku yang lain, yaitu suku Bugis dan suku China. Yang seringkali terjadi masalah adalah antara suku Dayak dengan Melayu, masalahnya biasanya soal agama, sedang antara suku bugis dan dayak, karena masalah ekonomi. Antara Dayak dan Madura, lebih karena perbedaan budaya. Sedangkan untuk etnis Cina, konflik Kadang-kadang muncul, tetapi jarang mencuat menjadi kekerasan. Memang harus diakui suku China menguasai ekonomi sektor modern perkotaan, sedang di pinggiran masih dominan petani-petani tradisional. Etnis Cina punya kecenderungan yang penting aman walaupun harus kehilangan uang untuk membayar pihak-pihak tertentu.
- 39 Khusus mengenai program *Community Policing*, ketika para polisi ditanya soal program tersebut, mereka menjawab bahwa mereka kenal istilah tersebut karena istilah tersebut sering disampaikan dalam pelbagai forum kepolisian di daerah maupun di Jakarta. Dan ketika ditanya apa yang mereka ketahui tentang program tersebut, mereka menjawab "Saya nggak tahu persis, tetapi kira-kira bagaimana masyarakat terlibat dan bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu bagaimana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polisi mendapat bantuan dan dukungan masyarakat".
- 40 Sebagai missal, pada bulan September 2001, terjadi penangkapan dan penyiksaan atas 2 (Manjut dan Leo) orang warga masyarakat adat Nyayat, karena melakukan aksi protes atas perusahaan Rana Watu Kencana (RWK). Penyiksaan ini dilakukan oleh aparat Polres Singkawang. Konflik antara warga dengan RWK sudah berlangsung sejak tahun 1996, ketika perusahaan menyerobot tanah adat di desa Meribas, Tebas, kabupaten Sambas. RWK ketika itu, tidak pernah memberikan kompensasi atas

tanah yang diambilnya. Dalam konflik ini, terlihat betapa represifnya aparat atas warga. Lihat dalam http://www.dayakology.com/publications/articles_news/eng/ips.htm.



perubahan hukum bukan kerja tunggal aparat, bukan kerja tunggal pengambil kebijakan melainkan kerja bareng dengan masyarakat. Semua organ yang ada di masyarakat telah memberikan kontribusi yang tidak kecil dan punya harapan yang tidak ringan. Program COP telah membuktikan satu kesimpulan akbar yang memang perlu untuk memperoleh perhatian kita semua, yakni kegagalan perubahan hukum selama ini karena kita memang kurang melibatkan publik untuk mengambil peranan aktif dan progresif. Di titik ini tampaknya pijakan pembaharuan hukum itu perlu dikerjakan.

1 Koord program reformasi Kepolisian dan kepala Divisi
Program Pusham UII



Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Suedy dkk, *"Luka Maluku, Militer Terlibat"*, ISAI, Jakarta, 2000
- Al Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press
- Anto, J. (ed.) 2002. *Luka Aceh, Duka Pers*. Medan: Kippas.
- Ellen Hochstedler, *"Jurnal of Criminal Justice"*, tahun 1981, No. 9
- Eko Parasetyo, *"Membela Agama Tuhan, Insist"*, 2002
- _____, *"Islam Kiri"*, Pustaka Pelajar, 2002
- Kasim, Ikdhal dan Johanes da Masenus Asrus (ed.). 2001. *Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan 2*. Jakarta: Elsam
- Ishak, Otto Syamsuddin. 2001. *Dari Maaf ke Panik Aceh 2, Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*. Jakarta-Aceh: Yappika-LSPP-CORDOVA
- . 2001. *Peristiwa Idi Cut Aceh, Dari Tragedi Ke Impunitas*. Jakarta-Aceh: Yappikap-LSPP-CORDOVA
- Lambang Trijono, *"Keluar Dari Kemelut Ambon"*, Pustaka Pelajar, 2001
- Muchtar Mas'ud, *"Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971"*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah dan Kekuatan GAM, Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: Grasindo.
- Petebang, Edi & Eri Sutrisno. 2000. *Konflik Etnik di Sambas*. Jakarta: ISAI
- Pitana, I Gde (Ed.). 1994. *Dinamikia Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post
- Schiller, Jim (Editor). 2003. *Jalan Terjal Reformasi Lokal, Dinamika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada.

- Show, Martin. 2001. *Bebas dari Militer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudagung, Hedro, Suroyo. 2001. *Mengurai Pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat*. Jakarta: ISAI dan Adhikarya.
- Theo Van Bomen, "Mereka Yang Menjadi Korban", ELSAM, Jakarta, 2002
- Widana, Gusti Ketut. 2002, *Mengenal Budaya Hindu di Bali, Sudah ada Merajan, kok Dirikan Kamar Suci?* Denpasar: Penerbit Bali Post
- Windhu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, A. Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: YOI dan Yayasan TIFA
- Zamzani, Amran (ed.) 2001. *Tragedi Anak Bangsa: Pembantaian Teungku Bantaqiyah dan Santri-Santrinya*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Ziwar Effendi, "Hukum Adat Ambon Lease", Pradnya Paramita, Jakarta

Internet

- Bamba, John *The Role of Adat in The Dayak and Madurese War*, dalam
- Djayadi Hanan, 2003. *Citra Diri Militer dan Pelanggaran Hak-hak asasi Manusia: Mencari Akar Kekerasan Militer di Aceh 1989-1998*, dalam http://www.cmddd.org/artikel_jh.htm.
- Djuweng, S. *Pembangunan dan Penindasan, Pelajaran dari Masyarakat Dayak*, dalam http://www.dayakology.com/publications/articles_news/ind/pembangunan.html
- <http://pontianak-online.com/equatopedia/fisiografi/>
- <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/dayak.html>
- <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/melayu.html>
- <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/cina.html>
- <http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/madura.html>

<http://pontianak-online.com/equatopedia/sejarah/bugis.html>
http://www.dayakology.com/publications/articles_news_eng/ips.html
<http://www.minorityrights.org>
<http://www.cmdd.org>

Majalah, Koran dan Jurnal

Ambon Ekspres (13 Nopember 2003)
Bali Post, 30 Desember 2003
Harsono, Irawati, 2002. *Masyarakat Sebagai Basis Resolusi Konflik*, dalam Jurnal Perempuan, Perempuan di Wilayah Konflik, Jakarta, edisi No. 24 Thn 2002.
Jurnal Ilmu-ilmu Budaya POESTAKA. No. 2 Tahun XII, Oktober 2001. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
Kompas, Senin 8 Februari 2004
Radiyta, No. 77, Desember 2003
TEMPO, 4-10 Nopember, 2002
Warta Bali, 29 Desember 2003.

Wawancara

Wawancara Kapolsek Mengwi, I Made Astika, SH, 27 Desember 2003.
Wawancara Kapolsek Abian Semal, I Made Sujana, 27 Desember 2003.
Wawancara Shobirin, Kabagmin Poltabes Denpasar, 26 Desember 2003.
Wawancara Putu Suprana, Reskrim Poltabes Denpasar, 26 Desember 2003.
Wawancara Kapolsek Khusus Bualu, Yulianus, 29 Desember 2003.
Wawancara Ipda I Made Putra, anggota SPK Poltabes Denpasar, 26 Desember 2003.
Wawancara Yatim Suyatmo, bagian Renbang Polda Bali, 29 Desember 2003.
Wawancara Ipda I Wayan Sumara, Kadit Patroli Polsek Kuta, 26 Desember 2003.

Sumber lain

Kepolisian Daerah Bali, Direktorat Reskrim. *Data Kasus Perkelahian Antar Banjar, tahun 2001 s/d Tahun 2003.*

Kepolisian Daerah Bali, Kota Besar Denpasar Sektor Mengwi. *Data Kasus Adat yang melibatkan Massa, tahun 2001-2003.*